



IMPELEMENTASI KEMISKINAN DAN STABILITAS PANGAN DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF POVERTY AND FOOD STABILITY IN INDONESIA

Putri Salsabela¹, Kevin Yusi Alvito², Elda Setiawati³, Anas Malik⁴

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email: putrialsabela06@gmail.com¹, Kevinusialvito1903@gmail.com², eldasetiawati23@gmail.com³,
anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Article history :

Received : 25-11-2024

Revised : 26-11-2024

Accepted : 28-11-2024

Published: 30-11-2024

Abstract

Numerous factors are connected to the issue of poverty. Exogenous and endogenous causes are the two broad categories into which the causes of poverty can be separated. Three categories of poverty are distinguished based on endogenous causes. The first type of poverty is structural poverty, which is brought on by laws, rules, or organizations that limit societal mobility and productivity. The second type of poverty is cultural poverty, which is poverty brought on by societally accepted patterns of behavior and values that result in low productivity. This is a response and adjustment to their marginal status within the social hierarchy. Third, natural poverty brought on by unsupportive environmental factors, like deficient natural resources or unfavorable geographic circumstances. In contrast, poverty stems from endogenous causes, which include physical weakness or deficiency (old age or disability), low human resource quality (low health, education, skills, and expertise), and weak personal character (fatalistic, apathetic, dependent, helpless, inferior, easily discouraged, not creative and innovative, etc.). The three are connected and have an impact on one another even though they can be separated.

Keywords: *Implementation, Poverty, Food Stability, Indonesia*

Abstrak

Banyak faktor yang terkait dengan masalah kemiskinan. Penyebab eksogen dan endogen adalah dua kategori besar yang menjadi dasar pemisahan penyebab kemiskinan. Kemiskinan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan penyebab endogen. Jenis kemiskinan pertama adalah kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh hukum, peraturan, atau organisasi yang membatasi mobilitas dan produktivitas masyarakat. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan kedua, yang disebabkan oleh nilai-nilai dan pola perilaku yang dapat diterima secara sosial yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Status mereka yang kurang beruntung dalam hierarki sosial merupakan akar penyebab dari respons dan adaptasi ini. Ketiga, kemiskinan yang disebabkan oleh letak geografis yang kurang baik atau kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti kurangnya sumber daya alam. Karakter yang buruk (fatalistik, apatis, tergantung, tidak berdaya, rendah diri, mudah putus asa, tidak kreatif dan inovatif, dsb.), sumber daya manusia yang buruk (kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang buruk), dan kekurangan atau kelemahan fisik (usia tua atau cacat) merupakan contoh penyebab endogen. Meskipun ketiganya dapat dipisahkan, semuanya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.

Kata Kunci: *Implementasi, Kemiskinan, Stabilitas Pangan, Indonesia*



PENDAHULUAN

Karena hampir setiap daerah di Indonesia dapat membuka lahan pertanian untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian, sektor pertanian di negara ini tidak diragukan lagi dibanjiri dengan berbagai macam produk pertanian unggulan yang digunakan untuk membuat bahan pangan. Karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan prasyarat utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas pangan. Kemiskinan merupakan salah satu kendala utama dalam mengidentifikasi masalah ini. Salah satu masalah tradisional yang telah ada sejak jaman dahulu adalah kemiskinan di daerah pedesaan.

Mayoritas penduduk desa tergolong miskin. Menurut data BPS, 37,3 juta orang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2003. Sekitar 60% dari mereka bekerja di bidang pertanian, dan sekitar 67% dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2003, sebanyak 13,7 juta (56,2%) petani pengguna lahan di Indonesia merupakan petani kecil, yang artinya mereka mengelola lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sementara itu, berdasarkan data resmi dari Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, hingga Juli 2008, sebanyak 34,96 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.

Mayoritas (63,47%) penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Ketahanan pangan Indonesia terancam karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dihadapi oleh para petani. Tujuan dari banyak lahan pertanian telah berubah, dan karena jumlah lahan pertanian yang dapat dikendalikan berkurang, semakin banyak petani kecil tidak lagi memiliki tanah yang mereka garap. Sementara itu, sulit bagi petani dengan sedikit pendidikan dan keahlian untuk beralih karier. Sektor ini memiliki dua tujuan: menjadi salah satu sasaran pembangunan utama dan salah satu

METODE PENELITIAN

Beberapa tugas yang berkaitan dengan proses pengumpulan data pustaka digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai bagian dari jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka, menurut Abdul Rahman Sholeh, adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, termasuk buku-buku, terbitan berkala, dokumen-dokumen, catatan-catatan narasi sejarah, atau penelitian pustaka eksklusif tentang topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketahanan Pangan

Untuk mencapai kesejahteraan nasional di abad ke-21, ketahanan pangan menjadi prioritas utama. Penjelasan PP 68/2009 menyatakan bahwa sumber daya pangan lokal yang beragam secara regional sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Ketika setiap rumah tangga memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk membeli pangan bagi setiap anggota keluarga dan tidak terancam kehilangan keduanya, maka hal ini disebut ketahanan pangan. Salah satu tujuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pada alinea keempat adalah tercapainya kesejahteraan umum, yang tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan, kecukupan, dan ketersediaan bahan pangan pokok merupakan bagian dari ketahanan pangan. Seseorang



dapat hidup aktif, sehat, dan produktif apabila tersedia cukup pangan untuk memenuhi kebutuhannya pada setiap waktu. Hal ini kita sebut sebagai ketahanan pangan. Ketersediaan pangan, ekonomi (daya beli), gizi (pemenuhan kebutuhan gizi individu), nilai budaya dan agama, ketahanan pangan (kesehatan), dan waktu (ketersediaan pangan yang berkesinambungan) merupakan komponen ketahanan pangan.

Subsistem distribusi, konsumsi, dan ketersediaan merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan. Tujuan dari subsistem ketersediaan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam hal kuantitas, kualitas, keanekaragaman, dan keamanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009. Perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertanian, air, dan hasil perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia, semuanya dianggap sebagai penghasil pangan. Kategori ini mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan/atau penyiapan makanan atau minuman.

Ketidakamanan pangan di rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai sementara atau kronis. Ketidakamanan pangan kronis, yang merupakan kekurangan pangan permanen yang disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk membeli makanan, biasanya disebabkan oleh kemiskinan. Ketidakamanan pangan sementara mengacu pada penurunan akses pangan jangka pendek, yang biasanya disebabkan oleh bencana alam yang mengubah produksi pangan, harga, dan pendapatan. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia, termasuk:

- a. Akses Pangan Karena pangan merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk bertahan hidup, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang dalam jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi. Produksi pangan dalam negeri harus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk agar kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi.
- b. Swasembada Pangan Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya merupakan faktor krusial yang perlu diperhatikan karena negara yang berdaulat penuh adalah negara yang independen dari negara lain dalam berbagai bidang, seperti politik, keamanan, dan ekonomi.
- c. Harga pangan Daya beli, yang dipengaruhi oleh pendapatan dan harga komoditas pangan, merupakan faktor utama yang menentukan keterjangkauan pangan atau akses masyarakat (rumah tangga) terhadap sumber daya.
- d. Konsumsi pangan Pola makan yang sehat dan seimbang terkait dengan kebiasaan makan. Distribusi dan jumlah pangan serta zat gizi yang dikonsumsi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lokal.

2. Kemiskinan dan ketahanan pangan

Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, termasuk sandang, pangan, dan papan. Penduduk termiskin, menurut Sajogyo, adalah mereka yang pengeluaran berasnya kurang dari 180 kg per tahun



untuk penduduk pedesaan dan 270 kg untuk penduduk perkotaan, sedangkan penduduk sangat miskin adalah mereka yang pengeluaran berasnya kurang dari 240 kg per tahun untuk penduduk pedesaan dan 360 kg per tahun untuk penduduk perkotaan. Sementara itu, ada beberapa komponen yang membentuk ketahanan pangan, antara lain: preferensi konsumen dan kebiasaan makan, aksesibilitas, ketergantungan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Ketahanan pangan tersedia di tingkat rumah tangga, regional, dan nasional. Ada dimensi waktu jangka pendek dan jangka panjang untuk stabilitas atau keandalan. Aspek pembangunan berkelanjutan terkait dengan keberlanjutan dan kecukupan jangka panjang. Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka sambil mematuhi pola makan sehat dikenal sebagai keterjangkauan. Akibatnya, ketahanan pangan bersifat dinamis dan multifaset, tidak hanya mencakup beras tetapi juga kapasitas keluarga untuk memperoleh cukup makanan padat gizi. Banyak faktor yang terkait dengan masalah kemiskinan.

Penyebab eksogen dan endogen adalah dua kategori besar yang menjadi dasar pemisahan penyebab kemiskinan. Tiga kategori kemiskinan dibedakan berdasarkan penyebab endogen. Jenis kemiskinan pertama adalah kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh hukum, aturan, atau organisasi yang membatasi mobilitas dan produktivitas masyarakat. Jenis kemiskinan kedua adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh nilai-nilai dan pola perilaku yang diterima masyarakat yang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Ini merupakan respons dan penyesuaian terhadap status marginal mereka dalam hierarki sosial.

Ketiga, kondisi geografis yang kurang mendukung atau sumber daya alam yang kurang memadai merupakan contoh kondisi alam yang tidak mendukung yang menyebabkan kemiskinan alamiah. Kelemahan atau kekurangan fisik (usia lanjut atau cacat), kurangnya sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan keahlian), dan kualitas pribadi yang lemah (fatalistik, apatis, tergantung, tidak berguna, harga diri rendah, mudah putus asa, kurangnya kreativitas dan inovasi, dan sebagainya) merupakan penyebab endogen kemiskinan. Meskipun berbeda, ketiganya saling terkait dan berdampak satu sama lain.

3. Ketahanan pangan sebuah makna awal

Meskipun menjadi fokus dari banyak makalah akademis dan rekomendasi kebijakan, istilah "ketahanan pangan" belum memiliki definisi yang disetujui secara umum. Sekarang ada beberapa posisi umum mengenai masalah ini, yang pertama menyatakan bahwa memastikan ketahanan pangan memerlukan pengurangan kelaparan dunia. Di sisi lain, swasembada pangan, harga beras yang stabil, pasokan beras global yang melimpah, dan ketersediaan valuta asing sebagai persyaratan untuk membayar impor beras semuanya termasuk dalam definisi ketahanan pangan populer lainnya.

Definisi standar ketahanan pangan, sebagaimana dikemukakan oleh Departemen Pertanian AS pada Konferensi Pangan Dunia 1996, adalah ketika setiap orang memiliki akses fisik dan finansial yang konsisten terhadap makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka untuk kehidupan yang produktif dan sehat. Aspek pertama dari tiga aspek ketahanan pangan yang saling terkait adalah tersedianya pangan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup, baik yang dipasok dari dalam negeri maupun melalui impor. Aspek kedua



adalah tersedianya sumber daya bagi masyarakat untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup. Aspek ketiga adalah pemanfaatan pangan melalui gizi, air, kebersihan, dan kesehatan yang baik. Stabilitas harga pangan merupakan faktor penting lainnya.

Menurut para ahli, suatu bangsa belum dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Meskipun ketersediaan pangan di tingkat nasional dan daerah cukup, ketahanan pangan masih dianggap belum memadai apabila akses terhadap pangan tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula, meskipun aksesibilitas dan ketersediaan di masyarakat dapat dikatakan memadai, ketahanan pangan belum dapat dikatakan cukup baik apabila stabilitas harga pangan tidak terjaga dengan baik, yang niscaya akan mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan.

Ketersediaan pangan juga mengacu pada jumlah dan kualitas bahan pangan yang dibutuhkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan energi dan kalori mereka untuk kegiatan ekonomi dan untuk meningkatkan standar hidup sumber daya manusia Indonesia. Memiliki cukup makanan untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat dikenal sebagai ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan rumah tangga tidak akan hilang begitu saja setelah ketahanan pangan nasional tercapai. Masalah ketahanan pangan tingkat rendah mungkin disebabkan oleh kesenjangan dalam distribusi pangan rumah tangga dan regional. Sebagai sebuah gagasan yang rumit, ketahanan pangan mencakup semua aspek sistem pangan dan gizi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi.

Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik semuanya memengaruhi ketersediaan pangan. Iklim dan sumber daya manusia yang sehat akan mendukung kepemilikan lahan, sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil. Hanya jika rumah tangga memiliki cukup uang, mereka dapat membeli pangan. Jumlah pangan yang dikonsumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap apakah setiap orang dalam rumah tangga dapat mencapai kesehatan yang optimal atau tidak. Gagasan kontemporer tentang ketahanan pangan menyatakan bahwa tanpa kemajuan kelembagaan dan teknologi yang menjadi inti gagasan kontemporer tentang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai.

4. STRATEGI KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN

Kemiskinan menyebabkan orang miskin di negara berkembang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Pelanggan di negara berkembang terus-menerus berisiko kelaparan dan rentan terhadap fluktuasi harga yang mengakibatkan kekurangan makanan. Banyak negara berkembang telah mengambil langkah-langkah tindakan publik untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka dalam mengantisipasi masalah ini. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengendalikan ekonomi pangan untuk mengurangi guncangan yang dapat menyebabkan kekurangan pangan, strategi standar biasanya berupaya mengurangi jumlah orang yang kelaparan. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan masyarakat miskin merupakan metode berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan, menurut Hukum Engel. Namun, stabilisasi harga pangan di negara-negara Asia menunjukkan bahwa meskipun fluktuasi harga sementara memiliki dampak yang lebih



besar pada jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli pangan, fluktuasi tersebut tidak membuat masyarakat miskin lebih rentan terhadap kekurangan pangan.

Ketahanan pangan dan kemiskinan telah lama saling terkait di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan inisiatif pemerintah untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi yang didorong pasar dengan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga (mikro) dan nasional (makro) telah dipadukan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Untuk menjangkau masyarakat miskin, desain kebijakan pangan yang dipikirkan dengan matang akan menghubungkan strategi pertumbuhan dan ketahanan pangan. Dengan membangun hubungan ini dengan ketahanan pangan dalam skala yang lebih besar, suatu negara dapat memanfaatkan peluang untuk ekspansi ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi makro yang lebih cepat dan pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan sistem pangan yang stabil, kebijakan pangan makro suatu negara akan meningkatkan ketahanan pangannya. Kita dapat lebih mengintegrasikan ketahanan pangan rumah tangga dengan pasar pangan nasional dengan menggunakan perspektif makro pada ekonomi pangan. Akibatnya, ketahanan pangan di tingkat makro dan mikro meningkatkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pemberantasan kemiskinan, dan partisipasi penuh warga negara dalam meningkatkan standar hidup di negara ini. Pengembangan ketahanan pangan pada dasarnya adalah pemberdayaan.

Aparatur pemerintah, pelaku usaha, konsumen, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat merupakan masyarakat yang turut berperan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Lembaga dan masyarakat harus bekerja sama secara terarah dan sinergis untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang melibatkan sejumlah pelaku. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan tidak dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dusun, dan kemandirian nasional. Pembangunan ketahanan pangan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama karena memberdayakan rumah tangga untuk mencapai ketahanan pangan secara mandiri.

Meningkatkan daya saing sumber daya manusia di pasar tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga merupakan dua contoh inisiatif pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan kini bergantung pada keberagaman dan potensi sumber daya lokal dan lebih didasarkan pada desentralisasi daripada pola penyerapan. Karena mustahil untuk meningkatkan kesejahteraan dengan lahan yang sempit, peluang usaha tidak terbatas pada pertanian padi; usaha pertanian non-padi juga harus dikembangkan. Dengan demikian, inisiatif untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat diarahkan ke sistem dan usaha agribisnis yang kompetitif, berkelanjutan, berorientasi pada rakyat, dan terdesentralisasi daripada berkonsentrasi pada pembangunan pertanian (dalam urutan utama). Daya beli rumah tangga untuk membeli makanan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan. Mereka akan memiliki kebebasan untuk memilih berbagai makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka berkat daya beli ini.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka dilakukan upaya peningkatan daya beli daripada penyediaan pangan murah. Peningkatan kapasitas rumah tangga (daya beli) untuk memperoleh cukup pangan halal, bergizi, dan sehat (baik dari pasokan sendiri maupun dari



pasar) guna mendukung gaya hidup produktif dan sehat merupakan cara mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dalam hal ini. Dengan demikian, kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan (daya beli) secara berkelanjutan dapat terwujud. Tidak perlu membatasi kemampuan untuk mengendalikan perdagangan pangan di berbagai daerah untuk mencapai kemandirian pangan; sebaliknya, hal itu harus didorong dan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bagi produsen dan konsumen pangan di daerah terkait.

Selain memiliki cukup makanan yang tersedia, ketahanan pangan juga mengacu pada kemampuan untuk memperoleh makanan (termasuk membelinya) dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani berada dalam posisi strategis untuk memastikan ketahanan pangan dalam skenario ini karena mereka adalah kelompok konsumen dan produsen pangan terbesar, dengan beberapa dari mereka masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan dana untuk membeli pangan. Selain memiliki kapasitas untuk memproduksi makanan, petani harus memperoleh cukup uang untuk menutupi pengeluaran makanan mereka sendiri. Di sinilah peran pemerintah dalam memberdayakan petani menjadi krusial.

Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pemberdayaan pembangunan merupakan langkah awal dalam berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya petani. Kolaborasi antara peneliti dan penyuluh dapat membantu mewujudkan hal ini. Keunggulan dalam hal keseimbangan lingkungan, pemanfaatan input lokal, dan kesesuaian ekosistem harus ada di lokasi pengembangan teknologi. Masyarakat dapat diberdayakan melalui pengembangan teknologi ini dan hasil dari upaya penelitian. Teknologi tentu dapat digunakan di lapangan oleh petani, dan penyuluhan serta penelitian dapat membantu mereka menjadi ahli di bidangnya. Hal ini diharapkan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan petani dan upaya pertanian. Akuisisi fasilitas produksi hanyalah salah satu aspek dari infrastruktur masyarakat; fasilitas pengembangan agribisnis penting lainnya seperti data pasar, peningkatan akses pasar, pendanaan, dan kolaborasi dengan lembaga bisnis lain juga harus disertakan.

Ketiga, membangun kembali lembaga dan sistem ketahanan pangan daerah. Pembangunan lumbung pangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Pemanfaatan sumber pangan daerah dan pengembangan budaya sesuai dengan perkembangan selera masyarakat. Kebangkitan kembali lembaga dan sistem ketahanan pangan masyarakat sangat diperlukan. Untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya mencapai ketahanan pangan, saat ini tengah dibangun lumbung pangan. Agar dapat menjadi sebuah kelembagaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki lumbung pangan, baik dari segi tampilan fisik maupun pengelolaannya. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian pedesaan.

Satu-satunya cara untuk memberdayakan petani guna mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah dengan mengoordinasikan semua aspek pembangunan pertanian. Tingkat intensitas harus ditingkatkan untuk memfasilitasi koordinasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Namun, menurut



pendekatan sistem pangan, kebijakan berikut di setiap subsistem juga dapat digunakan untuk menjalankan strategi untuk mencapai ketahanan pangan:

1. Subsistem Konsumsi Pangan

Pada subsistem konsumsi pangan (masyarakat konsumen), penciptaan lapangan kerja baru dan khususnya oleh pemerintah saat ini, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (SLT) bagi masyarakat miskin merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; pencarian komoditas pangan alternatif merupakan strategi yang digunakan untuk diversifikasi dan perbaikan kebiasaan makan; perbaikan gizi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan; pencarian komoditas pangan alternatif merupakan strategi yang digunakan untuk diversifikasi dan perbaikan kebiasaan makan; perbaikan gizi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan; dan pembangunan sistem jaminan mutu pangan merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Secara khusus, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja ditempuh melalui strategi pengembangan pelatihan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, kebijakan ekonomi makro harus memfasilitasi hal ini, misalnya, dengan mempermudah pemilik usaha baru untuk memperoleh kredit bank. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa metode Bank Indonesia untuk mencapai hal ini tidak selalu konsisten dengan metode bank lain. Pemerintah kita juga menawarkan kesempatan kerja bagi kaum muda di luar negeri sebagai bagian dari upaya penciptaan lapangan kerja.

a) Subsistem Produksi Pangan

Karena penggunaan strategi rekayasa teknologi, ekonomi, sosial, dan nilai tambah dalam praktik produksi memiliki konsekuensi politis terhadap status beras sebagai komoditas, kebijakan intensifikasi pertanian yang mengutamakan produksi beras pada level atas subsistem produksi pangan tetap perlu dipertahankan. Zonasi dan penetapan wilayah pengembangan pertanian merupakan dua metode yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan penyuluhan pertanian. Pengembangan lahan pertanian baru untuk produksi pangan, seperti lahan basah (sawah) dan lahan kering, merupakan bagian dari strategi ini dan terkait dengan kegiatan transmigrasi.

Sasaran subsektor hortikultura adalah membangun, meningkatkan, dan menumbuhkan fasilitas produksi buah unggul yang terkait dengan perluasan kebun induk. Pembentukan kebun benih sebagai bagian dari rencana untuk membudidayakan buah-buahan potensial dan pemulihan jaringan irigasi sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan produksi padi adalah dua contoh bagaimana kebijakan rehabilitasi pertanian selaras dengan strategi untuk mengidentifikasi komoditas prioritas. Kebijakan diversifikasi pertanian dilaksanakan sesuai dengan kondisi agroklimat lahan melalui strategi diversifikasi horizontal dengan rekayasa sistem pertanian terpadu, yang melibatkan usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang saling melengkapi dan bersinergi. Di tingkat nonpertanian, strategi pengembangan



agroindustri digunakan untuk melaksanakan kebijakan subsistem produksi. Pertumbuhan sektor pengolahan makanan juga akan mengarah pada diversifikasi pertanian vertikal, yang dapat meningkatkan nilai tanaman yang ditanam.

b) Subsistem Peredaran

Kebijakan pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi harga pangan, dan subsistem sirkulasi pangan (pengadaan dan penyaluran) semuanya dilaksanakan, khususnya untuk komoditas beras. Penetapan jangka waktu ketersediaan beras cadangan aman untuk ketahanan pangan dan penerapan langkah-langkah pengendalian ekspor dan impor merupakan cara pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan untuk komoditas ini.

Penetapan harga minimum dan harga maksimum gabah dan intervensi pasar beras berdasarkan harga beras dunia merupakan dua cara kebijakan stabilisasi harga beras dilakukan, jika diperlukan. Kebijakan pengembangan pasar komoditas dilakukan dengan melaksanakan rencana untuk menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dengan ketentuan perdagangan yang tidak menghambat mekanisme pasar yang optimal. Untuk mencapai mekanisme pasar yang sempurna, perlu dipikirkan secara matang agar strategi stabilisasi harga beras tidak melanggar ketentuan perdagangan.

KESIMPULAN

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, termasuk sandang, pangan, dan papan, dikenal sebagai kemiskinan. Mereka yang menghabiskan kurang dari 180 kg beras per tahun untuk penduduk pedesaan dan 270 kg untuk penduduk perkotaan dianggap paling miskin, sedangkan mereka yang menghabiskan kurang dari 240 kg untuk penduduk pedesaan dan 360 kg untuk penduduk perkotaan dianggap sangat miskin, menurut Sajogyo.

Meskipun istilah "ketahanan pangan" telah menjadi fokus banyak publikasi akademis dan rekomendasi kebijakan, istilah ini belum memiliki definisi yang diakui secara umum. Mengenai hal ini, kini ada beberapa pendapat yang diterima secara luas. Yang pertama adalah bahwa memastikan ketahanan pangan memerlukan pengurangan kelaparan dunia. Namun, definisi ketahanan pangan lain yang diterima secara luas mencakup ketersediaan devisa sebagai prasyarat untuk membayar impor beras, swasembada pangan, harga beras yang stabil, dan pasokan beras yang melimpah di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudjarad 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit
- Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengkaji dampak penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik terhadap mutu pelayanan publik. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Moehar, Daniel 2004, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



- Ndraha, T. 2005, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintaha*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P. 2012, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono 1980, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Suryabrata, Sumadi 2016, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thriwaty Aarsal. *Keamanan pangan dan kemiskinan di kalangan petani* . Forum Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 1 Juni 2022
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2006, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.
- Virginia V. Rumawas, dkk. Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan: Kontribusi Pemerintah terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. Vol.1, No. 1, 2021